

PERAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK) DALAM MENDORONG AGLOMERASI INDUSTRI DI LUAR JAWA

Deris Desmawan¹, Pega Lisah², Nor Syahira³, M.Raihan Syahputra⁴, Vini Anggraeni⁵, Regie Desnine Rahmatullah⁶

Ilmu Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

derisdesmawan@untirta.ac.id, 5553240003@student.untirta.ac.id,
5553240004@student.untirta.ac.id, 5553240005@student.untirta.ac.id,
5553240006@student.untirta.ac.id, 5553240008@student.untirta.ac.id

Abstract

The imbalance in Indonesia's economic structure, dominated by Java, has prompted the government to establish a Special Economic Zone (SEZ) policy as an instrument to spur industrialization outside Java. This study aims to analyze the role of SEZs in encouraging the formation of industrial agglomerations outside Java and evaluate the gap between policy expectations and the reality of implementation. This study uses a descriptive qualitative method with a library research approach sourced from secondary data, official agency reports, and related literature. The results show that agglomeration patterns in SEZs outside Java are policy driven and have not formed naturally like in Java. Key findings indicate that fiscal incentives alone are ineffective in compensating for high logistics costs and minimal physical infrastructure. As a result, SEZs outside Java risk becoming closed areas (enclaves) or "cathedrals in the desert" with minimal connectivity to the local economy, thus triggering value-added leakage and failing to create an inclusive multiplier effect for surrounding communities.

Keywords: *Special Economic Zones (SEZs), Industrial Agglomeration, Regional Disparities, Logistics Infrastructure, Enclave Economy.*

Abstrak

Ketimpangan struktur perekonomian Indonesia yang didominasi oleh Pulau Jawa mendorong pemerintah menetapkan kebijakan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sebagai instrumen untuk memacu industrialisasi di luar Jawa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran KEK dalam mendorong terbentuknya aglomerasi industri di luar Jawa serta mengevaluasi kesenjangan antara harapan kebijakan dengan kenyataan implementasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research) yang bersumber dari data sekunder, laporan lembaga resmi, dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola aglomerasi di KEK luar Jawa bersifat policy driven (didorong kebijakan) dan belum terbentuk secara alamiah seperti di Jawa. Temuan utama mengindikasikan bahwa insentif fiskal semata tidak efektif mengkompensasi tingginya biaya logistik dan minimnya infrastruktur fisik. Akibatnya, KEK di luar Jawa berisiko menjadi kawasan tertutup (enclave) atau "katedral di tengah gurun" yang minim konektivitas dengan ekonomi lokal, sehingga memicu kebocoran nilai tambah (leakage) dan belum mampu menciptakan efek berganda yang inklusif bagi masyarakat sekitar.

Article history

Received: November 2025

Reviewed: November 2025

Published: November 2025

Plagiarism checker no 80

Doi : prefix doi :
[10.8734/musytari.v1i2.365](https://doi.org/10.8734/musytari.v1i2.365)

Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

Kata Kunci: <i>Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Aglomerasi Industri, Ketimpangan Wilayah, Infrastruktur Logistik, Enclave Economy.</i>	
---	--

1. Pendahuluan

Struktur perekonomian Indonesia selama beberapa dekade terakhir menunjukkan karakteristik ketimpangan spasial yang cukup persisten. Pertumbuhan ekonomi nasional masih sangat didominasi oleh aktivitas di Pulau Jawa, yang secara konsisten menyumbang kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) hingga tahun 2023, Pulau Jawa berkontribusi sekitar 57,27% terhadap perekonomian nasional, sementara wilayah di luar Jawa, khususnya Kawasan Timur Indonesia, memiliki porsi yang jauh lebih kecil meskipun memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah. (BPS, 2023) Fenomena Jawasentris ini mengindikasikan bahwa akselerasi pembangunan belum terdistribusi secara merata, yang pada akhirnya menciptakan inefisiensi biaya logistik yang tinggi dan ketergantungan wilayah lain terhadap pasokan barang dari Jawa. Oleh karena itu, paradigma pembangunan perlu digeser secara fundamental dari pendekatan sektoral menuju pendekatan kewilayahan untuk menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mandiri.

Upaya pemerataan ekonomi tersebut tidak cukup hanya dilakukan melalui pembangunan infrastruktur fisik semata, melainkan memerlukan penciptaan ekosistem industri yang terintegrasi, atau yang dikenal dalam literatur ekonomi sebagai aglomerasi industri. Dalam perspektif New Economic Geography yang dipopulerkan oleh Paul Krugman, aglomerasi industri terjadi ketika perusahaan-perusahaan berkumpul di lokasi geografis yang sama untuk memanfaatkan efisiensi biaya melalui pembagian input (input sharing), ketersediaan tenaga kerja terampil (labor pooling), dan pertukaran pengetahuan (knowledge spillovers). (Krugman, 1991) Namun, aglomerasi ini sulit terbentuk secara alamiah di luar Jawa karena minimnya infrastruktur dasar dan ekosistem rantai pasok yang belum matang. Tanpa intervensi kebijakan yang spesifik, investor akan terus memadati Pulau Jawa karena pertimbangan efisiensi pasar dan aglomerasi yang sudah terbentuk lebih dulu.

Merespons tantangan tersebut, pemerintah menetapkan kebijakan strategis melalui pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009. KEK didesain bukan hanya sebagai kawasan industri biasa, melainkan sebagai instrumen untuk menarik investasi melalui insentif fiskal dan non-fiskal yang agresif guna memicu industrialisasi di daerah. (PEMERINTAH PUSAT, 2009) Fokus pengembangan KEK di luar Jawa, seperti KEK Sei Mangkei di Sumatera Utara atau KEK Galang Batang di Kepulauan Riau, diarahkan pada hilirisasi sumber daya alam untuk menciptakan nilai tambah di daerah penghasil. Harapannya, keberadaan KEK ini mampu menstimulasi efek berganda (multiplier effect) dan menciptakan klaster industri baru yang mengurangi ketergantungan daerah terhadap barang jadi dari Jawa maupun impor.

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pembentukan aglomerasi industri melalui skema KEK di luar Jawa menghadapi tantangan yang jauh lebih kompleks dibandingkan di Jawa. Sejumlah literatur internasional, seperti studi dari Thomas Farole (2011) dalam bukunya *Special Economic Zones in Africa: Comparing Performance and Learning from Global Experience*, menyoroti bahwa banyak kawasan ekonomi di negara berkembang gagal memicu aglomerasi dan hanya berakhir menjadi "enclave" atau kawasan tertutup yang tidak memiliki keterkaitan dengan ekonomi lokal sekitarnya. (Farole, 2011) Data Dewan Nasional KEK juga memperlihatkan

adanya disparitas realisasi investasi, di mana KEK yang berlokasi di Jawa (seperti KEK Kendal atau Gresik) cenderung lebih cepat berkembang dibandingkan KEK di luar Jawa yang masih berfokus pada isu infrastruktur penunjang dan konektivitas. Kesenjangan antara harapan kebijakan dan realitas implementasi inilah yang mendasari pentingnya penelitian ini untuk menganalisis lebih dalam mengenai sejauh mana peran KEK mampu mendorong terbentuknya aglomerasi industri yang efektif di luar Pulau Jawa.

2. Tinjauan Pustaka

Analisis mengenai peran Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dalam mendorong pemerataan industri tidak dapat dilepaskan dari kerangka teoritis Ekonomi Geografi Baru (New Economic Geography) dan konsep aglomerasi industri. Secara fundamental, teori aglomerasi yang berakar dari pemikiran klasik Alfred Marshall dan dikembangkan lebih lanjut oleh Paul Krugman menjelaskan bahwa aktivitas ekonomi memiliki kecenderungan alamiah untuk memusat di satu lokasi tertentu. Fenomena ini didorong oleh tiga kekuatan eksternalitas utama, yaitu ketersediaan tenaga kerja terampil (labor market pooling), ketersediaan pemasok input antara (input sharing), dan limpahan pengetahuan teknologi (knowledge spillovers). Dalam perspektif Krugman, konsentrasi industri di suatu wilayah seperti yang terjadi di Pulau Jawa menciptakan "cumulative causation" atau sebab-akibat kumulatif, di mana wilayah yang sudah maju akan semakin menarik investasi baru karena efisiensi biaya, sementara wilayah pinggiran akan semakin tertinggal. (Krugman, 1991) Teori ini menjadi kunci analisis utama untuk memahami mengapa industri enggan bergeser ke luar Jawa tanpa adanya intervensi radikal.

Melengkapi pandangan Krugman tentang geografi ekonomi, Michael Porter memperkenalkan konsep keunggulan kompetitif melalui pembentukan klaster (industrial cluster). Porter menekankan bahwa daya saing suatu lokasi tidak lagi bertumpu pada keunggulan komparatif statis seperti upah buruh murah atau kekayaan alam semata, melainkan pada kemampuan menciptakan inovasi melalui interaksi antar-perusahaan yang berdekatan. Dalam kerangka ini, keberhasilan KEK diukur dari terbentuknya "Diamond Model", di mana terdapat persaingan lokal yang sehat, kondisi permintaan yang canggih, serta kehadiran industri pendukung dan terkait (related and supporting industries). (Porter, 1998) Tantangan terbesar bagi KEK di luar Jawa, jika ditinjau dari teori Porter, adalah ketiadaan industri pendukung tersebut. Industri inti (misalnya smelter nikel atau pabrik kelapa sawit) sering kali berdiri sebagai entitas tunggal tanpa didukung oleh pemasok mesin, penyedia jasa logistik khusus, atau lembaga riset lokal, sehingga nilai tambah yang tercipta cenderung bocor keluar wilayah (leakage) kembali ke Jawa atau luar negeri.

Selain faktor geografis dan infrastruktur fisik, literatur ekonomi pembangunan kontemporer menempatkan kualitas kelembagaan (institutional quality) sebagai bagian vital dari keberhasilan kawasan industri. Dani Rodrik, dalam kajiannya mengenai kebijakan industri, berargumen bahwa kegagalan industrialisasi di banyak negara berkembang bukan semata-mata karena ketiadaan modal, melainkan akibat lemahnya koordinasi antara pemerintah dan sektor swasta serta ketidakpastian regulasi. (Rodrik, 2004) Dalam konteks KEK, insentif fiskal seperti tax holiday sering kali menjadi tidak efektif ketika biaya transaksi akibat birokrasi yang berbelit dan ketidakpastian hukum di tingkat daerah masih tinggi. Kebijakan pemerintah pusat memberikan insentif pajak, namun inefisiensi di level lokal menggerus margin keuntungan investor. Oleh karena itu, analisis mengenai aglomerasi di luar Jawa tidak bisa hanya melihat ketersediaan lahan dan pelabuhan, tetapi juga harus meninjau kapasitas tata kelola pemerintah daerah dalam melayani kebutuhan industri yang dinamis.

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) atau Special Economic Zones (SEZ) hadir sebagai instrumen "aglomerasi buatan". Literatur internasional, seperti yang ditulis oleh Thomas Farole (2011) dalam studinya bersama Bank Dunia, mendefinisikan SEZ sebagai wilayah demografis terbatas di mana peraturan ekonomi didesain lebih liberal dibandingkan hukum nasional yang berlaku. (Farole, 2011) Farole menekankan bahwa insentif fiskal (seperti pembebasan pajak) hanyalah pemanis awal, namun keberhasilan jangka panjang SEZ dalam menciptakan aglomerasi industri sangat bergantung pada faktor "soft infrastructure", yaitu kepastian regulasi, efisiensi birokrasi, dan integrasi dengan ekonomi domestik. Studi ini memberikan peringatan penting bahwa pembangunan zona industri yang terisolasi tanpa konektivitas rantai pasok hanya akan menciptakan fenomena *cathedrals in the desert* kawasan megah yang tidak memberikan dampak ekonomi bagi wilayah sekitarnya.

Mengacu pada pengalaman empiris global, terdapat perbedaan signifikan antara implementasi SEZ di Asia Timur dibandingkan dengan wilayah lain. Studi dari Douglas Zhihua Zeng (2015) menyoroti keberhasilan China dalam memanfaatkan SEZ sebagai katalis aglomerasi melalui strategi linkage yang kuat antara perusahaan asing di dalam kawasan dengan pemasok lokal. Model ini berhasil mentransfer teknologi dan menciptakan kluster industri yang mandiri. (Zeng, 2015) Sebaliknya, Aradhna Aggarwal (2012) yang meneliti perkembangan SEZ di India dan negara berkembang lainnya menemukan bahwa banyak kawasan gagal berkembang karena lokasi yang dipilih lebih didasarkan pada pertimbangan politik alih-alih kelayakan ekonomi logistik. (Aggarwal, 2012) Pelajaran dari literatur global ini sangat relevan untuk menganalisis tantangan KEK di luar Jawa, di mana jarak geografis dan biaya logistik sering menjadi penghambat utama terbentuknya ekosistem industri yang kompetitif.

Selain itu, peneliti Indonesia yang menjelaskan mengenai KEK dan aglomerasi industri masih menunjukkan hasil yang beragam. Beberapa peneliti, seperti Mudrajad Kuncoro, kerap menekankan bahwa tantangan utama desentralisasi industri di Indonesia adalah belum terintegrasinya sistem logistik nasional, yang membuat biaya pengiriman dari luar Jawa seringkali lebih mahal dibandingkan impor dari luar negeri. (Kuncoro, 2018) Penelitian terdahulu mengenai kawasan industri di Indonesia menunjukkan bahwa efektivitas insentif pajak dalam KEK belum sepenuhnya mampu mengompensasi tingginya biaya operasional akibat minimnya infrastruktur di luar Jawa. Namun, terdapat optimisme baru dalam studi-studi terkini yang melihat potensi hilirisasi sumber daya alam (seperti nikel dan kelapa sawit) sebagai penarik utama aglomerasi. Dalam hal ini, KEK tidak lagi bersaing untuk industri manufaktur padat karya seperti di Jawa, melainkan menciptakan spesialisasi baru berbasis keunggulan komparatif daerah. Namun, ada juga peneliti yang berpikiran berbeda contohnya melalui kajian dari Hal Hill yang sering menyoroti masalah fragmentasi pasar domestik. Biaya logistik antar pulau di Indonesia yang tergolong tinggi menyebabkan fenomena aneh dalam perdagangan, di mana wilayah di luar Jawa sering kali lebih berdagang dengan pasar internasional daripada dengan pasar domestik di Jawa. Kondisi ini memiliki dampak ganda terhadap aglomerasi. Di satu sisi, hal ini mendorong industri di KEK luar Jawa untuk ekspor sepenuhnya karena pasar lokal tidak mampu menyerap produk atau biaya kirim ke Jawa terlalu mahal. Di sisi lain, hal ini menyulitkan terbentuknya aglomerasi yang kokoh karena ketergantungan pada komponen impor menjadi sangat tinggi. Akibatnya, efek berganda (*multiplier effect*) bisa terjadi. Ekonomi yang harusnya bisa menyebar ke daerah sekitar menjadi sulit, karena kawasan industri tersebut beroperasi layaknya sebuah pulau tersendiri yang terpisah dari struktur ekonomi regional tempatnya berada.

Berdasarkan gabungan dari berbagai literatur tersebut, maka kami melihat adanya kesenjangan (gap) antara harapan teoritis dengan realitas implementasi. Teori aglomerasi mensyaratkan efisiensi dan kedekatan, sementara KEK di luar Jawa dibangun di lokasi yang secara logistik belum efisien. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk kami agar dapat memahami mengenai bagaimana pengaruh kebijakan KEK dapat mempengaruhi ekonomi sehingga aglomerasi industri tetap dapat terbentuk meskipun tanpa dukungan pasar alamiah yang kuat, serta bagaimana perubahan dari sekadar kawasan investasi menjadi ekosistem industri yang matang untuk bisa dicapai.

3. Metodologi Penelitian

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan sifat deskriptif. Tujuannya untuk membedah masalah yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan angka, yaitu bagaimana proses industri berkumpul (aglomerasi) di KEK luar Jawa dan mengapa perkembangannya berbeda dengan di Jawa. Penelitian tidak mencari pengaruh antar-variabel (seperti regresi statistik), melainkan mendeskripsikan kondisi rantai pasok, hambatan logistik, dan efektivitas kebijakan insentif yang ada di lapangan.

Sumber Data

Penelitian ini sepenuhnya dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), sehingga data yang digunakan seluruhnya merupakan data sekunder. Oleh karena itu, penelusuran terhadap artikel resmi yang ada dinilai sudah sangat memadai untuk menjawab pertanyaan penelitian mengenai peran KEK dalam aglomerasi industri tanpa perlu melakukan pengambilan data langsung di lapangan.

Sumber data yang menjadi rujukan utama dalam penelitian ini berasal dari publikasi resmi pemerintah dan lembaga kredibel lainnya. Untuk data spesifik mengenai perkembangan kawasan, peneliti merujuk pada Laporan Tahunan dan statistik yang diterbitkan oleh Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Dari sumber ini, diambil data-data penting seperti nilai realisasi investasi, jumlah industri atau tenant yang masuk, serta serapan tenaga kerja di KEK luar Jawa. Data tersebut kemudian disandingkan dengan data kewilayahan dari Badan Pusat Statistik (BPS), terutama data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor industri pengolahan dan data statistik industri besar-sedang. Tujuannya adalah untuk melihat konteks ekonomi daerah sebelum dan sesudah adanya KEK.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan data sekunder dari jurnal ilmiah, artikel, dan laporan resmi. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis isi (content analysis) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Tujuan penelitian adalah untuk memahami, menjelaskan, dan menghubungkan berbagai argumen dan temuan yang sudah ada dalam literatur yang berkaitan dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan aglomerasi industri. Selama proses ini, kami membaca, membandingkan, dan menarik benang merah dari berbagai sumber data teks yang telah dikumpulkan untuk menemukan jawaban atas rumusan masalah.

4. Hasil dan Pembahasan

Table 1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

NO	Peneliti	Judul	Inti Pembahasan
1	(Riesfandiari Indri., Styawan Budhi., 2023)	Dampak Kawasan Ekonomi Khusus (Kek) Sei Mangkei Terhadap Perekonomian Di Kabupaten Simalungun	Studi menggunakan metode Difference-in-Differences (DiD) yang berfokus membahas mengenai evaluasi dampak ekonomi KEK Sei Mangkei dengan membandingkan kecamatan di Kabupaten Simalungun (lokasi KEK) dan Kota Pematang Siantar (non-KEK). Hasil penelitian menyimpulkan bahwa meskipun KEK Sei Mangkei memberikan dampak positif yang signifikan terhadap pertumbuhan PDRB per kapita di tingkat kecamatan, besaran dampaknya tergolong kecil, yakni hanya meningkatkan pertumbuhan sebesar 0,06% lebih tinggi dibandingkan wilayah tanpa KEK setelah kawasan beroperasi. Dampak yang belum optimal ini disebabkan oleh kurangnya pemanfaatan insentif fiskal oleh investor akibat ketidakjelasan prosedur, insentif yang dianggap tidak jauh berbeda dengan fasilitas di luar KEK, serta kendala infrastruktur dan akses yang belum memadai.
2	(Juniarti Fitriana., Masyhudi., 2024)	Dampak Ekonomi Masyarakat Desa Kuta Lombok Terhadap Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika (Kek) Dikecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah	menyimpulkan bahwa keberadaan KEK Mandalika memberikan dampak ekonomi positif yang nyata bagi masyarakat lokal Desa Kuta. Studi ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, penelitian ini menemukan bahwa KEK berhasil menciptakan peluang usaha baru dan mendorong pertumbuhan UMKM, khususnya di sektor pendukung pariwisata seperti homestay, rumah makan, jasa penyewaan, dan

			kerajinan songket Sasak. Selain peningkatan omzet penjualan dan penyerapan tenaga kerja, dampak positif juga dirasakan melalui pembangunan infrastruktur yang lebih baik serta peningkatan pendapatan daerah melalui pajak dan retribusi. Namun, jurnal ini menekankan bahwa pengembangan sumber daya manusia (SDM) lokal masih perlu ditingkatkan dan diperlukan komunikasi yang lebih baik antara masyarakat, pemerintah, dan pengelola (ITDC) untuk menghindari kesalahpahaman dalam proses pembangunan ke depannya.
3	(Sidan, 2023)	Economic zones and local income inequality : Evidence from Indonesia	Studi ini menunjukkan bahwa pembukaan kawasan ekonomi di Indonesia secara umum berdampak positif terhadap peningkatan ketimpangan pendapatan di tingkat provinsi, namun efek rata-ratanya relatif kecil. Analisis menemukan heterogenitas wilayah yang kuat, di mana kenaikan ketimpangan terutama didorong oleh zona-zona di Pulau Jawa, sedangkan untuk rata-rata zona di luar Jawa, dampaknya secara statistik adalah nol. Secara spesifik pada studi kasus di luar Jawa, KEK Mandalika di Nusa Tenggara Barat tidak menunjukkan bukti adanya peningkatan ketimpangan pendapatan, berbeda dengan temuan tentatif pada kawasan industri di Aceh yang mengalami kenaikan ketimpangan jangka pendek. Fenomena ketimpangan yang muncul ini kemungkinan besar disebabkan oleh mekanisme pertumbuhan yang bias keterampilan

			(skill-biased growth), yang di mana kawasan ekonomi meningkatkan permintaan dan upah bagi tenaga kerja terampil, sementara penduduk lokal yang kurang terampil akan tertinggal.
4	(Wardhana, 2024)	Ungkap Potensi Kawasan Ekonomi Khusus dalam Mewujudkan Ekonomi Inklusif	Melalui metode literature review, studi ini mengevaluasi kinerja KEK yang mencatatkan investasi Rp22,2 triliun dan penyerapan 8.686 tenaga kerja (per 2020), namun mengidentifikasi tantangan struktural berupa konsentrasi manfaat pada korporasi besar dan risiko eksploitasi SDA. Penelitian menyimpulkan perlunya transisi menuju ekonomi sirkular dan penerapan pembangunan berbasis wilayah (place-based development) untuk mencegah kegagalan distribusi pendapatan. Disarankan adanya fasilitasi akses modal dan pelatihan vokasi agar UMKM lokal dapat masuk ke dalam rantai pasok industri.

Dinamika Aglomerasi Industri di Luar Jawa

Berdasarkan analisis literatur menunjukkan adanya perbedaan mendasar antara pola aglomerasi yang terjadi di Pulau Jawa dengan yang lagi diusahakan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) luar Jawa. Dalam penelitian ini, menyoroti teori New Economic Geography dari Krugman yang menekankan pentingnya akses pasar dan kumpulan tenaga kerja (labor pooling) sebagai daya tarik utama industri.(Krugman, 1991) Namun, dari studi Wardhana (2024) mengungkapkan bahwa aglomerasi di KEK luar Jawa tidak dibentuk secara alami melalui mekanisme pasar tersebut, melainkan didorong oleh kebijakan pemerintah (policy-driven) yang mewajibkan hilirisasi sumber daya alam.(Wardhana, 2024) Meskipun adanya investasi sebesar Rp22,2 triliun hingga awal 2020 karakteristik industrinya sangat berbeda. Jika industri di Jawa tumbuh karena efisiensi biaya dan jejaring pemasok yang banyak, industri di KEK luar Jawa cenderung berdiri sendiri dan padat modal. Hal ini menciptakan tantangan, tanpa dukungan pasar yang matang, KEK di luar Jawa sangat bergantung pada insentif buatan pemerintah dan rentan terhadap fluktuasi harga komoditas global, berbeda dengan ekosistem industri di Jawa yang lebih tangguh karena diversifikasi pasarnya.

Namun, terdapat perdebatan utama dalam penelitian ini adalah mengenai manakah yang lebih penting antara insentif pajak atau pembangunan infrastruktur. Berdasarkan studi kasus KEK Sei Mangkei oleh Riesfandiari, Setyawan, dan Wahyudi (2023) memberikan jawaban yang tegas

untuk Indonesia. Meskipun pemerintah menawarkan pembebasan pajak (tax holiday) yang agresif, dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi lokal sangat minim, dengan kenaikan pertumbuhan PDRB per kapita hanya sebesar 0,06% di atas wilayah non-KEK. Lalu, Rendahnya dampak investasi terhadap PDRB disebabkan oleh minimnya pemanfaatan insentif tersebut oleh investor. Pelaku usaha justru lebih dibebani oleh biaya distribusi logistik yang tinggi akibat infrastruktur jalan yang buruk di sekitar kawasan. Penelitian ini juga terlihat berhubungan dengan teori Thomas Farole, bahwa insentif fiskal seperti tax holiday hanyalah langkah awal. Tanpa adanya perbaikan infrastruktur jalan dan kepastian logistik, insentif fiskal akan gagal untuk menghalangi kerugian lokasi (*locational disadvantage*) di luar Jawa, menjadikan KEK kurang bersaing dibandingkan kawasan industri di Jawa yang memiliki akses logistik lebih efisien.(Farole, 2011)

Risiko Kawasan Tertutup (Enclave) dan Isu Ketimpangan

Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah munculnya risiko KEK berubah menjadi kawasan tertutup atau enclave, yang di mana aktivitas industri besar di dalam kawasan tidak terhubung dengan ekonomi masyarakat lokal. Fenomena yang disebut Thomas Farole sebagai *cathedrals in the desert*. Berdasarkan konsep *Diamond Model* dari Michael Porter, daya saing lokasi ditentukan oleh kehadiran industri pendukung (*supporting industries*). (Farole, 2011) Namun dari hal ini bisa disimpulkan bahwa pembukaan zona ekonomi di Jawa cenderung meningkatkan ketimpangan pendapatan, namun untuk zona di luar Jawa, dampaknya terhadap ketimpangan cenderung netral atau tidak signifikan secara statistik.

Namun, netralitas ini tidak selalu bermakna positif. Hal ini bisa juga diartikan bahwa kehadiran KEK di luar Jawa belum mampu menciptakan adanya interaksi ekonomi yang cukup untuk mempengaruhi pendapatan masyarakat luas. Ada kemungkinan bahwa pertumbuhan yang terjadi bersifat bias pada tenaga kerja terampil (*skill-biased*), di mana industri membutuhkan keahlian yang sering kali tidak dimiliki oleh tenaga kerja lokal di luar Jawa. Akibatnya, transfer teknologi terhambat dan masyarakat lokal berisiko hanya menjadi penonton di tengah pertumbuhan kawasan industri tersebut.

Fakta di lapangan juga menunjukkan bahwa KEK di luar Jawa, yang umumnya industri berbasis sumber daya alam (seperti kelapa sawit atau nikel), seringkali berdiri sebagai perusahaan tunggal. Berdasarkan studi dari Wardhana (2024) memperkuat hal ini dengan mengidentifikasi tantangan di mana manfaat ekonomi terkonsentrasi pada korporasi besar, sementara risiko eksploitasi SDA meningkat. (Wardhana, 2024) Hilangnya industri pendukung lokal seperti penyedia mesin, jasa perbaikan, atau logistik khusus menyebabkan nilai tambah yang tercipta kembali ke Jawa atau ke luar negeri. Akibatnya, efek berganda (*multiplier effect*) yang diharapkan dari aglomerasi tidak menyebar ke daerah sekitar, melainkan terisolasi di sekitar kawasan industri.

Dampak Sosial Ekonomi dan Tantangan Inklusivitas

Berdasarkan segi pemerataan kesejahteraannya, keberadaan KEK di luar Jawa menunjukkan hasil yang beragam. Studi Sidan (2023) menemukan bahwa secara rata-rata, zona ekonomi di luar Jawa memiliki dampak statistik nol terhadap ketimpangan pendapatan, berbeda dengan di Jawa yang justru mendorong ketimpangan. (Sidan, 2023) Namun, terdapat risiko *skill biased growth*, di mana permintaan tenaga kerja terfokus pada mereka yang memiliki keterampilan tinggi, sementara penduduk lokal yang kurang terampil akan tertinggal.

Di sisi lain, terdapat potensi positif jika disatukan dengan masyarakat lokal dan bisa dikelola dengan baik. Studi kasus di KEK Mandalika (Lombok) membuktikan bahwa kawasan tersebut mampu mendorong pertumbuhan UMKM lokal di sektor pariwisata. Meskipun, harus diimbangi dengan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) lokal agar masyarakat tidak hanya menjadi penonton. Tanpa upaya pendekatan pembangunan daerah yang memfasilitasi akses modal dan pelatihan vokasi bagi warga setempat, aglomerasi industri di KEK berpotensi gagal mewujudkan ekonomi yang bisa dirasakan oleh setiap lapisan masyarakat.

5. Kesimpulan dan Saran

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis literatur, penelitian ini bisa disimpulkan bahwa pola aglomerasi industri di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) luar Jawa memiliki karakteristik yang berbeda secara fundamental dibandingkan dengan yang ada di Pulau Jawa. Jika aglomerasi di Jawa terbentuk secara alamiah karena efisiensi pasar dan jejaring pemasok yang matang, aglomerasi di KEK luar Jawa lebih bersifat policy driven atau didorong oleh kebijakan pemerintah. Kondisi ini menyebabkan industri di KEK luar Jawa cenderung berdiri sendiri dan belum membentuk klaster yang terintegrasi, karena ketiadaan industri pendukung lokal yang memadai menyebabkan nilai tambah ekonomi bocor (leakage) kembali ke Jawa atau ke luar negeri. Akibatnya, risiko terbentuknya kawasan tertutup atau enclave yang di mana kawasan industri tidak memiliki keterkaitan ekonomi dengan wilayah sekitarnya menjadi sangat nyata, atau yang bisa diistilahkan sebagai fenomena cathedrals in the desert.

Penelitian ini juga menemukan bahwa efektivitas insentif fiskal, seperti tax holiday, terbukti belum mampu menjadi daya tarik utama yang mengkompensasi kerugian lokasi (locational disadvantage) di luar Jawa. Sebagaimana terbukti pada kasus KEK Sei Mangkei, dampak insentif terhadap pertumbuhan ekonomi lokal sangat minim karena investor lebih terbebani oleh tingginya biaya logistik dan buruknya infrastruktur fisik dibandingkan beban pajak.

Dari sisi sosial ekonomi, keberadaan KEK di luar Jawa menunjukkan dampak yang netral terhadap ketimpangan pendapatan, namun hal ini mengindikasikan minimnya interaksi ekonomi dengan masyarakat lokal. Fenomena pertumbuhan yang bias keterampilan (skill-biased growth) menyebabkan tenaga kerja lokal yang kurang terampil tertinggal, sehingga masyarakat tempatan berisiko hanya menjadi penonton di tengah industrialisasi daerahnya sendiri.

SARAN

Saran utama bagi pemerintah dan pemangku kepentingan adalah perlunya merubah kebijakan dari pendekatan yang berfokus pada insentif fiskal menuju pembangunan ekosistem yang menyeluruh. Pemerintah perlu memprioritaskan perbaikan infrastruktur logistik dan konektivitas antarpurau untuk menurunkan biaya distribusi yang selama ini menjadi penghambat utama daya saing KEK di luar Jawa. Selain itu, diperlukan kebijakan alternatif untuk menciptakan strategi yang saling keterkaitan antara industri besar di dalam KEK dengan UMKM lokal sebagai rantai pasok, guna mencegah terjadinya enclave dan memastikan efek berganda ekonomi dapat dirasakan oleh daerah sekitar.

Pengembangan kualitas sumber daya manusia (SDM) lokal harus menjadi prioritas yang sangat penting, melalui penyediaan pendidikan vokasi yang relevan dengan kebutuhan industri spesifik di masing-masing KEK. Hal ini dilakukan untuk mengatasi kesenjangan keterampilan (skill gap)

dan mencegah dominasi tenaga kerja luar yang dapat memicu ketimpangan sosial. Selanjutnya, perbaikan kualitas kelembagaan daerah dalam hal kepastian regulasi dan efisiensi birokrasi sangat diperlukan agar kawasan ini dapat berubah dari yang awalnya sekadar zona investasi menjadi ekosistem industri yang matang dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Aggarwal, A. (2012). *Social and Economic Impact of SEZs in India*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198077275.001.0001>
- [2] BPS. (2023). *Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan II-2023*. 55.
- [3] Farole, T. (2011). *Special Economic Zones in Africa*.
- [4] Juniarti Fitriana., Masyhudi., A. I. (2024). DAMPAK EKONOMI MASYARAKAT DESA KUTA LOMBOK TERHADAP KAWASAN EKONOMI KHUSUS MANDALIKA (KEK) DIKECAMATAN PUJUT, KABUPATEN LOMBOK TENGAH. 4(2), 429-434.
- [5] Krugman, P. (1991). Increasing Returns and Economic Geography. *Journal of Political Economy*, 99(3), 483-499. <https://doi.org/10.1086/261763>
- [6] Kuncoro, M. (2018). *Perencanaan Pembangunan*. Gramedia Pustaka Utama. <https://books.google.co.id/books?id=pMx1DwAAQBAJ>
- [7] PEMERINTAH PUSAT. (2009). *UNDANG-UNDANG NO 39 TAHUN 2009*.
- [8] Porter, M. E. (1998). *Competitive Advantage of Nations*. Free Press. <https://books.google.co.id/books?id=XrB32lQL94AC>
- [9] Riesfandiari Indri., Styawan Budhi., W. T. I. (2023). DAMPAK KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK) SEI MANGKEI TERHADAP PEREKONOMIAN DI KABUPATEN SIMALUNGUN. 7(1), 147-170.
- [10] Rodrik, D. (2004). *Faculty Research Working Papers Series*. November.
- [11] Sidan, D. G. (2023). *Economic zones and local income inequality: Evidence from Indonesia*.
- [12] Wardhana, C. S. (2024). Ungkap Potensi Kawasan Ekonomi Khusus dalam Mewujudkan Ekonomi Inklusif. 5(4).
- [13] Zeng, D. Z. (2015). *Global Experiences with Special Economic Zones □ With a Focus on China and Africa*. February, 1-17.